

**JURNAL**  
**POLITICO**

**KEKUASAAN NEGARA DALAM STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MIANGAS**

*Zenith Timotius Malli Ananda*

**SISTEM PEMILU MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA PADA PERILAKU PEMILIH**

*(Sebuah Refleksi dari Pemilu 2009)*

*Franky R.D. Rengking*

**TINGKAT KESADARAN POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANNY JAYA PROPINSI PAPUA**

*(Suatu Studi di Distrik Pirime)*

*Wespen Wenda, Michael Mamentu, Burhan Niode*

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT**

*(Suatu Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan  
Tahun 2010)*

*Demianis Aya*

**PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI POLITIK**

*(Suatu Studi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten  
Minahasa Selatan Tahun 2010)*

*Risky Perupau*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO PROPINSI PAPUA TAHUN 2011**

*John Siffy Miro*

**PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU DALAM MENGATASI KONFLIK  
ANTARA SUKU DANI dan SUKU DAMAL DI KABUPATEN PAPUA**

*(Suatu Studi di Mimika Propinsi Papua.)*

*Urdinus Kogoya*

**PERAN POLITIK PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS SISTEM MULTI PARTAI**

*Josef Karamawan Kalupau*

**OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH  
YANG BAIK DI KOTA MANADO**

*Sarah Sambran*

**ETIKA POLITIK PEJABAT PADA PELAKSANAAN SISTEM POLITIK INDONESIA**

*Renny Gasal*

**PERANAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN  
PUBLIK DI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MANADO**

*Juppy Rampas*



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO**

## Jurnal Politico

<b>KEKUASAAN NEGARA DALAM STRUKTUR ADAT MASYARAKAT MIANGAS</b> <i>Zenith Timotius Malli Anaada</i>	2-16
<b>SISTEM PEMILU MULTIPARTAI DAN PENGARUHNYA PADA PERILAKU PEMILIH</b> <i>(Sebuah Refleksi dari Pemilu 2009)</i> <i>Franky R.D. Rengkung</i>	17-22
<b>TINGKAT KESADARAN POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANNY JAYA PROPINSI PAPUA</b> <i>(Suatu Studi di Distrik Pirime)</i> <i>Werpen Wenda, Michael Mamentu, Burhan Niode</i>	23-27
<b>PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT</b> <i>(Suatu Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010)</i> <i>Demianus Aya</i>	28-39
<b>PERAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI POLITIK</b> <i>(Suatu Studi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2010)</i> <i>Risky Porajow</i>	40-52
<b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO PROPINSI PAPUA TAHUN 2011</b> <i>John Siffy Mirin</i>	53-73
<b>PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA SUKU DALAM MENGATASI KONFLIK ANTARA SUKU DANI dan SUKU DAMAL DI KABUPATEN PAPUA</b> <i>(Suatu Studi di Mimika Propinsi Papua.)</i> <i>Undinus Kogoya</i>	74-83
<b>PERAN POLITIK PEMUDA DALAM MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS SISTEM MULTI PARTAI</b> <i>Josef Kurniawan Kairupan</i>	84-91
<b>OPTIMALISASI FUNGSI DPRD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG BAIK DI KOTA MANADO</b> <i>Sarah Sambiran</i>	92-99
<b>ETIKA POLITIK PEJABAT PADA PELAKSANAAN SISTEM POLITIK INDONESIA</b> <i>Renny Gosal</i>	100-104
<b>PERANAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI KOTA MANADO</b> <i>Jepny Rompas</i>	105-112

## JURNAL POLITICO

### PELINDUNG

Dekan Fisip Unsrat

### PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

### PEMIMPIN REDAKSI

Drs Burhan Niode, MA

### Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. Jusuf Wowor, MSi

### Dewan

Dr. Drs. Michael Mamentu, MA  
Drs. Johnly Pangemanan, MSi  
Efvendi Sondakh, SIP, MSi  
Drs. Rivo Sumampouw, MSi  
Maxi Egeten, SIP, MSi

### Sekretariat

Trintje Lambey, SIP, MSi  
J. Tompodung, SIP, MSi

### Lay Out & Sirkulasi

Franky R.D Rengkung, SIP, MA  
Hendra Pulukadang, SIP

### Alamat :

Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado  
Telp. 0431 – 862586 Kode Pos 95115  
Email : [politico.unsrat@yahoo.com](mailto:politico.unsrat@yahoo.com)

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
MANADO

## DAFTAR ISI

### Kekuasaan Negara Dalam Struktur Adat Masyarakat Miangas

*Zenith Timotius Malli Anaada* 2-16

### Sistem Pemilu Multipartai Dan Pengaruhnya Pada Perilaku Pemilih

*Franky R.D. Rengkung* 17-22

### Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya Propinsi Papua.

*(Suatu Studi Di Distrik Pirime)*  
*Werpen Wenda, M. Mamentu, B. Niode* 23-27

### Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

*(Suatu Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010)* 28-39

### Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

*(Suatu Studi Pada Pilkada Bupati Di Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2010)*  
*Risky Parajow* 40-52

### Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua Tahun 2011

*John Siffy Mirin* 53-73

### Peranan Kepemimpinan Kepala Suku Dalam Mengatasi Konflik Antara Suku Dani Dan Suku Damal Di Kabupaten Papua

*(Suatu Studi di Mimika Propinsi Papua)*  
*Undinus Kogoya* 74-83

### Peran Politik Pemuda Dalam Mewujudkan Efektivitas Sistem Multipartai

*Josef Kurniawan Kairupan* 84-91

### Optimalisasi Fungsi DPRD Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintah Yang Baik Di Kota Manado

*Sarah Sambiran* 92-99

### Etika Politik Pejabat Pada Pelaksanaan Sistem Politik Indonesia

*Ronny Gosal* 100-104

### Peranan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Informasi Dan Komunikasi Kota Manado

*Jappy Rompos* 105-112



## ETIKA POLITIK PEJABAT PADA PELAKSANAAN SISTEM POLITIK INDONESIA

Oleh:

T.A.M. Ronny Gosal<sup>1</sup>

### ABSTRAK

*Di era reformasi ini banyak terjadi kemerosotan etika termasuk etika politik dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia. Kemunduran etika politik ini salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Maka dari itu, etika politik diperlukan untuk merubah sikap pragmatism tersebut.*

*Ada beberapa manfaat etika politik bagi para pejabat. Pertama, etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Kedua, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan parapejabat agar tidak menyalahi etika. Ketiga, para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya.*

*Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatudengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfer politik.*

**Keywords:** *Etika Politik, Pejabat, Sistem.*

### Pendahuluan

Ibarat watak binatang terselip disetiap insan politik: 'merpati dan ular'. Politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan dalam memperjuangkan

idealisme. Tetapi, ia juga punya watak ular yang licik dan jahat, serta selalu berupaya untuk memangsa merpati. Celakanya, yang sering menonjol adalah "sisi ular" ketimbang watak "merpati"-nya. Ketika berbicara soal etika politik, bahkan ekstimitas watak politisipun diasosiasikan dengan "watak binatang". Etika, atau filsafat moral (Telchman, 1998) mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik dengan demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan sebaliknya. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik. Publik hanya disuguhi hal yang menyenangkan dan bersifat indrawi belaka. Artinya hanya diberi harapan tanpa realisasi. Inilah yang membuat publik terajari agar menerapkan orientasi hidup untuk mencari gampangnya saja. Keadaban kita sungguh-sungguh kehilangan daya untuk memperbarui dirinya. Etika politik yang berpijak pada Pancasila hancur karena politik identik dengan uang. Uang menjadi salah satu penentu dalam ruang publik. Di masa reformasi yang serba boleh ini, kemunduran etika politik para elite dalam setiap jejak perjalanannya membuat kita menjadi "miris". Kemunduran etika politik para elite ini salah satunya ditandai dengan menonjolnya sikap pragmatisme dalam perilaku politik yang hanya mementingkan kelompoknya saja. Kepentingan bangsa, menurut mereka bisa dibangun hanya melalui kelompoknya. Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik berikut praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan membatasi, meregulasi, melarang dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang dijauhi. Sebagai masyarakat yang modern, untuk mengetahui pentingnya etika

<sup>1</sup> Staf Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi Manado.

dalam pelaksanaan sistem politik di Indonesia adalah perlu.

Tujuan politik sama dengan etika dan sama dengan tujuan kehidupan manusia pada umumnya yaitu berkiblat pada eudaimonia. Etika dan politik yang menjadi etika politik menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan dari semua kebijakan politik dan apa yang harus dicapai oleh para pemegang jabatan publik. Karena itu etika politik menuntut para pejabat untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip yang diterima universal tanpa perbedaan baik sebagai warga negara biasa maupun sebagai pemegang jabatan publik. Etika politik sangat penting bagi para pejabat agar mereka dapat mengambil suatu kebijakan yang tidak merugikan masyarakat umum.

Lalu apa yang terjadi dengan politik tanpa etika? Privatio etika dalam berpolitik dapat membuat para pemegang jabatan publik/penguasa menyalahgunakan jabatannya. Tragedi Mei 1998 adalah contoh politik yang dijalankan tanpa etika. Hal ini dinilai melanggar etika politik karena pemerintah menyalahgunakan kekuasaan untuk mempertahankan kedudukannya. Dengan ini mengabaikan prinsip kekuasaan berasal dari rakyat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat.

Contoh nyata lain yaitu kebijakan pengesahan UU Pornografi yang belum jelas substansi persoalan utamanya yang menimbulkan masalah lain seperti fenomena premanisme. Kebijakan tersebut dinilai melanggar etika politik karena pemerintah mengabaikan suara masyarakat yang menolak UU tersebut. Pemerintah dilihat mengarah pada sistem pemerintahan yang totaliter dan terlalu mencampuri privasi rakyat, sementara negara kita adalah negara demokrasi. Dengan ini pemerintah mengabaikan peran masyarakat dalam negara alam demokrasi yang dapat mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Praktik korupsi yang menggurita dalam struktur birokrasi kita juga disebabkan karena ketiadaan etika dalam berpolitik.

#### Pembahasan

Sebagai salah satu cabang etika, khususnya etika politik termasuk dalam

lingkungan filsafat. Filsafat yang langsung mempertanyakan praksis manusia adalah etika. Etika mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia. Ada berbagai bidang etika khusus, seperti etika individu, etika sosial, etika keluarga, etika profesi, dan etika pendidikan dalam hal ini termasuk setika politik yang berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia, dengan demikian, etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga Negara terhadap Negara, hukum yang berlaku dan lain sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan secara rasional objektif dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah idiologis dapat dijalankan secara obyektif.

Hukum dan kekuasaan Negara merupakan pembahasan utama etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif, kekuasaan Negara sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif sesuai dengan struktur ganda kemampuan manusia (makhluk individu dan sosial). Jadi etika politik membahas hukum dan kekuasaan. Prinsip-prinsip etika politik yang menjadi titik acuan orientasi moral bagi suatu Negara adalah adanya cita-cita *The Rule Of Law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan HAM menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur kebudayaan masyarakat masing-masing dan keadaan sosial. Ada beberapa manfaat etika politik bagi para pejabat. Pertama, etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan maka etika sebagai prinsip normatif/etika normatif (bukan metaetika) sangat diperlukan. Etika di sini ada sebagai sebuah keharusan ontologis. Dengan memahami etika politik, para pejabat tidak



akan menyalahgunakan kekuasaannya. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak menyadari bahwa mereka adalah representan rakyat, karenanya mereka mesti melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, bukan membunuh rakyat dengan mencaplok dan mengambil lapangan pekerjaan utama sebagai sumber hidup mereka.

Kedua, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme control masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahetika. Masyarakat sebagai yang memiliki negara tidak bisa melepaskan diri dalam mengurus negara. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan para pejabat, namun dalam tataran tertentu keduanya berbeda. Dalam negara dengan alam demokrasi peranan masyarakat sangat besar yang nyata dalam sikap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Para pejabat sebagai representan rakyat tentu akan mendengar kritikan tersebut sebelum sebuah kebijakan yang diambil. Warga negara yang demokratis mesti berusaha untuk menghentikan pengambilan keputusan yang dapat merugikan warga walaupun keputusan tersebut dianggap benar oleh para pejabat. Mekanisme kontrol tersebut sangat penting agar para pejabat tidak mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat. Tindakan masyarakat yang memprotes kebijakan pemerintah dilihat sebagai cara masyarakat mengontrol kebijakan yang diambil pemerintah.

Ketiga, para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya. Para pejabat bekerja dalam lingkup organisasional, oleh karena itu segala kebijakan yang diambil mesti berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri dari tanggung jawabnya sebagai seorang pribadi atas sebuah keputusan. Tanggung jawab pribadi tidak hanya berlaku saat ia memegang jabatan publik tertentu, tetapi juga terus berlanjut ketika ia berada pada *free position*. Tanggung jawab pribadi juga dapat mendukung akuntabilitas bagi keputusan yang kurang

dapat dianggap berasal dari pejabat-pejabat yang baru. Karena tanggung jawab pribadi melekat pada pribadi dan bukan pada kolektivitas, maka tanggung jawab tersebut selalu melekat dan mengikuti pejabat ke mana pun ia pergi. Kita dapat menelusurinya setiap waktu juga pada saat ia tidak sedang memegang suatu jabatan publik tertentu.

Dalam pembahasan etika, persoalan yang diperbincangkan mengenai konteks baik atau buruk suatu perbuatan manusia. Khususnya mengenai nilai-nilai perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu. Pengelompokan perbuatan baik dan buruk tentunya mengacu pada aturan yang berlaku sebagai landasan etika. Setiap manusia memiliki hati nurani yang menjadi penyaring sebelum melakukan tindakan. Naluri inilah yang menjadi pengontrol untuk melakukan perbuatan yang baik. Tindakan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yakni baik atau buruk. Dalam pengelompokan tersebut memberikan batasan bagi setiap manusia agar tidak melakukan apa yang ingin dilakukan melainkan tindakan itu harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Persoalan etika merupakan hal yang sangat vital dalam interaksi sosial karena setiap perbuatan manusia menimbulkan dampak sesuai dengan apa yang dilakukan. Perbuatan yang baik menghasilkan dampak yang baik, begitupun sebaliknya. Meskipun dalam kenyataan dilapangan, khususnya ranah politik, terkadang perbuatan yang baik berdampak buruk dan perbuatan yang buruk berdampak baik.

Hal ini terjadi karena pemahaman 'menghalalkan segala cara' menghiasi pentas perpolitikan di Indonesia. Dinamika politik kebangsaan baik politik lokal maupun politik nasional hamper melupakan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara hukum, negara religius, dan negara yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya. Keterkaitan etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunya akan melahirkan dampak negatif yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta yang terjadi dilapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan oleh hilangnya 'ruh'

etikapada diri seorang politisi. Keterpurukan etika inilah menyebabkan maraknya kecurangan seperti politik uang, kampanye negatif, pembohongan masyarakat, janjikepalsuandanperang kata-kata. Keterpurukan tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk mencapai target. Sehingga segala cara dilakukan tanpa mengindahkan nilai hakiki yang telah dianut masyarakat Indonesia sejak pra kemerdekaan. Perlu dipahami bahwa hal ini sangat menciderai hati nurani dan prinsip demokrasi masyarakat Indonesia yang khas dengan kearifan lokal sebagai bangsa yang bermartabat.

Merosotnya etika para aktor politik membuat masyarakat Indonesia gelisah dalam menggapai kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik. Pelaku politik cenderung hanya berbicara kepentingan praktis. Padahal dalam setiap ruang dan waktu terdapat batasan perilaku manusia yang dirumuskan dalam sebuah tata nilai berkehidupan. Penanaman etikalah yang perlu diindahkan oleh semua pelaku politik tanpaterkecuali. Biar bagaimanapun juga, praktek politik tidak akan pernah mencapaiposisi ideal jika melupakan prinsip-prinsip etika. Etikalah yang akan mengarahkan kearah yang lebih baik karena etika akan berperan sebagai pengendali setiap gerak langkah.

Sebenarnya etika dalam politik tidak susah untuk diaplikasikan. Penulis pun meyakini bahwa sebenarnya para pelaku politik sadar bahwa praktek kecurangan yang dilakukan itu tidak dibenarkan. Hanya saja karena hal ideal ini diperhadapkan dengan kesenangan pragmatis yang justru menghancurkan rumusan nilai yang sudah dibangun puluhan tahun yang lalu. Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfir politik. Penafsiran politik itu baik atau buruk sangat

tergantung pada aktor (pelaku) politik itu sendiri. Akan mengarah ke hal yang positif jika pelakunya memiliki kesadaran akan sebuah prinsip moral, dan mengarah ke hal negatif jika mengabaikan prinsip tersebut.

Pada dasarnya politisilah yang memiliki peran penting dalam mengendalikan praktek politik itu sendiri. Penilaian bahwa politik itu suatu perjuangan, politik itu suatu ibadah, politik itu suatu kebajikan yang perlu dicapai bersama-sama. Hal ini hanyalah sekedar hayalan apabila elemen masyarakat menjadi penonton sejati atas rekayasa yang dilakukan oleh politisi. Dengan demikian, perlu ada kontrol sosial agar keterpurukan tidak semakin merajalela.

#### Kesimpulan

Ada beberapa manfaat etika politik bagi para pejabat. Pertama, etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Kedua, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para pejabat agar tidak menyalahi etika. Ketiga, para pejabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya.

Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfir politik. Etika politik bagi para pejabat mesti menghasilkan makna moral dari tugasnya dalam memegang jabatan publik tertentu, dan mesti dapat merubah cara berpikir dan bertindak para pejabat. Dengan demikian esensi etika politik bagi parapejabat dapat benar-benar eviden, evidensi ini muncul dalam tataran praktik bukan dalam tataran konsep.

#### Saran

Para politisi perlu diingatkan bahwa peran mereka memuat suatu tanggungjawab sosial. Bukan sekedar tanggungjawab pribadi, partai



atau golongan. Ketika aktivitas yang dilakukan itu penuh dengan tanggungjawab sosial maka tentunya ada suatu pertanggungjawaban moral kepada masyarakat atas semua hal yang dilakukan. Tanggungjawab sosial mestinya dimaknai sebagai janji. Artinya, berbicara janji, tentunya berbicara sesuatu yang harus ditepati sehingga apabila tidak ditepati maka dengan sendirinya mendapat sanksi. Minimal dalam bentuk sanksi moral. Ketika para politisi sadar akan tanggungjawab sosial maka dengan sendirinya mereka selalu memperhatikan etika dalam berpolitik. Enggan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari esensi yang sebenarnya dari politik. Halyang pertama dan utama dibutuhkan pada konteks ini adalah kesadaran. Apabila kesadaran itu dimiliki maka politisi pasti akan selalu berperilaku yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hamersma, Harry. 2008. Pintu Masuk ke Dunia Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- Adib, Mohammad. 2010. Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keraf, Sony. 2000. Ilmu Pengetahuan, Sebuah Tinjauan Kefilsafatan. Jakarta: Grafindo.
- Bertens, K. 2007. Etika. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Magnis -Suseno, Franz. 1987. Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
- Subakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo



